

ABSTRAK

Pada tahun 2017 lalu terjadi kasus pemukulan yang dilakukan oleh tiga pemain PSAP Sigli terhadap wasit pengadil lapangan yang memimpin pertandingan antara PSAP Sigli vs Aceh United pada lanjutan Liga 3 Provinsi Banda Aceh di Stadion H Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh yang mengakibatkan wasit mengalami beberapa luka memar diwajahnya. Kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan lantaran adanya aduan dari pihak korban yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut dan tidak adanya ijtihad baik dari pelaku. Dengan dilanjutkannya kasus tersebut ke persidangan maka banyak tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang menyatakan bahwa Negara melakukan intervensi terhadap otoritas sepakbola Indonesia yaitu PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia). Tetapi di sisi lain Negara menganggap bahwa kasus ini masuk dalam wewenangnya.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini bahwa kasus pemukulan yang dilakukan pesepakbola terhadap wasit dalam pertandingan sepakbola berdasarkan putusan perkara No.69/Pid.B/2018/PN.Bna Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan putusan pidana terhadap ketiga terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemukulan (kekerasan) yang dilakukan dengan tenaga bersama dan terang-terangan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dalam menjatuhkan suatu putusan seorang hakim harus didasari pertimbangan-pertimbangan. Adapun pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan putusan ini yaitu, adanya alat bukti *Visum et Repertum* dari korban, Unsur-Unsur dari Pasal 170 ayat (1) yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi, Hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci : Sepakbola, PSSI, Tindak Pidana, dan Pasal 170 ayat (1) KUHP

ABSTRACT

In 2017, there was an assault case carried out by three PSAP Sigli players against the court referee who led the match between PSAP Sigli vs Aceh United in the League 3 of Banda Aceh Province at the H Dimurtala stadium, Lampineung, Banda Aceh which caused the referee experiencing several bruises on his face. The case continued to the court since there was a complaint from the victim who felt aggrieved over the incident and the absence of ijtihad from the perpetrator. With the continuation of this case, there were a lot of pros and cons from various parties. Some of them state that the State intervened in the Indonesian football authority, PSSI (Indonesian Football Association). However, on the other side, the State was considering this case as its authority.

The result of this research and discussion of legal writing shows that the assault case carried out by the players against the referee based on case decision No.69 / Pid.B / 2018 / PN. Bna, the Banda Aceh District Court handed down a criminal verdict against the three defendants who were proven to have committed act of beating (violence) which were carried out jointly and openly against people as stipulated in Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code. In order to make a decision a judge must be based on all the considerations. As for the judge's main consideration of making this decision is the evidence of Visum et Repertum of the victim, the Elements of Article 170 paragraph (1) that were charged to the Defendant were fulfilled, Matters that were burdensome and mitigating.

Keywords: Football, PSSI, Criminal Act, Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code.